

## ABSTRAK

Stren Kali Surabaya terletak di wilayah administratif Surabaya namun dalam wewenangnya di bawah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemanfaatan wilayah Stren Kali Surabaya sebagai tempat tinggal telah ada semenjak tahun 1960-an. Hal ini akibat dari terjadinya gejolak tinggi urbanisasi ke Kota dan tidak ada lagi wilayah lain yang dapat ditempati oleh masyarakat, terutama mereka yang tingkat perekonomiannya menengah ke bawah. Pemanfaatan ini sebenarnya telah melanggar peraturan, baik peraturan nasional maupun peraturan daerah, dimana kawasan Stren atau bantaran kali tidak diperbolehkan adanya bangunan permanen.

Penggusuran pada awal tahun 2002 di wilayah Stren Kali Panjang Jiwo hingga Wonorejo merupakan titik mula munculnya perlawanan dari masyarakat untuk bergerak melawan kebijakan penggusuran dari pemerintah. munculnya paguyuban yang didirikan oleh masyarakat Stren Kali Surabaya semata berusaha untuk mempertahankan pemukiman mereka. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan penataan pemukiman menghadapkan letak rumah menghadap ke arah sungai, sebagai salah satu cara untuk menjaga lingkungan yang ada.

Penelitian ini dilakukan di kawasan Stren Kali Gunungsari, dimana dipilih oleh penulis dikarenakan kawasan ini telah menata bangunan rumah yang ada menghadap ke sungai. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui kepentingan dari pemerintah dalam melakukan penggusuran bangunan di wilayah Stren Kali, 2) mengetahui kepentingan dari masyarakat dalam mempertahankan pemukiman mereka, 3) mengetahui siapa saja yang menjadi aktor dalam masalah stren Kali Surabaya ini dan bagaimana relasi yang ada di antara mereka serta 4) memetakan mekanisme akses dan hak, konflik sumberdaya alam serta tujuan dari penataan pemukiman masyarakat yang ada. Penelitian ini menggunakan prespektif ekologi politik, hasil analisis dengan menggunakan prespektif tersebut menunjukkan bahwa penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mengembalikan kondisi lingkungan Kali Surabaya menjadi baik kembali.

Penataan pemukiman yang dilakukan oleh masyarakat bisa diterjemahkan sebagai mekanisme akses untuk tetap dapat mengakses sumberdaya yang ada di Kawasan Stren Kali Surabaya. Kedepannya dengan adanya penataan pemukiman oleh masyarakat, pemerintah lebih dapat melihat berbagai macam solusi yang dapat dipakai dalam menata kawasan Stren Kali Surabaya selain dengan melakukan penggusuran, sehingga bila memungkinkan kedepannya pula konsep penataan pemukiman ini bisa menjadi *rule models* untuk kawasan Stren Kali yang ada di kawasan lainnya.

Kata kunci: stren kali, konflik, ekologi politik, akses, penataan pemukiman